

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Industri kepariwisataan tumbuh menjadi sebuah industri yang sangat menjanjikan bagi keberlangsungan perekonomian suatu negara. Jalinan kerja sama politik yang dilakukan oleh antar negara menjadikan industri ini berkembang dengan cepat. Akses keluar masuk antar negara yang mudah dan adanya jaminan perlindungan hukum membuat mobilitas antar negara menjadi cepat. Organisasi Pariwisata Dunia dan Bank Dunia menganggap bahwa industri kepariwisataan menjadi salah satu factor yang sangat penting dalam kegiatan ekonomi dan social dalam kehidupan masyarakat. Industri pariwisata menjadi penting karena menghasilkan devisa yang besar bagi negara. Sehingga industri ini perlu dikembangkan untuk peningkatan perekonomian negara. Indonesia sebagai negara kepulauan mempunyai kekayaan alam yang melimpah yang tersebar di seluruh penjuru nusantara membuat pariwisatanya berpotensi besar dalam menyumbang pendapatan negara. (Nurmansyah, 2014)

Yenni (2016) menyatakan dalam rangka mewujudkan masyarakat yang sejahtera melalui penerimaan devisa negara, perluasan dan pemerataan peluang usaha, mendorong pembangunan daerah, memperkaya budaya bangsa, dengan tetap mempertahankan ciri khas bangsa dan tetap mempertahankan nilai-nilai agama, pembangunan kepariwisataan diharapkan mampu memberi kemakmuran bagi suatu bangsa.

Penyelenggaraan pariwisata menuntut keterkaitan antara pemerintah, korporasi, dan masyarakat dengan masyarakat yang serasi, serasi, dan seimbang guna mewujudkan potensi industri pariwisata nasional yang berdaya saing internasional.

Dalam mewujudkan pembangunan pada tiap daerah maka dikeluarkanlah Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 mengenai otonomi daerah. Otonomi daerah dibuat sebagai upaya untuk memperkuat perekonomian dalam negeri. Sehingga dalam upaya pemulihan ini tidak hanya dilakukan oleh Pemerintah Pusat saja. Keberadaan otonomi daerah memperluas peluang daerah-daerah untuk ikut bekerja sama memperkuat ekonomi bangsa. Dengan adanya peraturan ini maka tiap daerah mempunyai kewajiban untuk meningkatkan perekonomian daerahnya dengan upaya memanfaatkan potensi dan keunggulan yang dimiliki. Setelah diberlakukan otonomi daerah maka tiap daerah harus mempunyai kemandirian dari struktur keuangannya. Hal ini dimaksudkan agar tiap daerah mempunyai penerimaan yang tidak hanya bersumber pada Pemerintah Pusat namun mampu menghasilkannya sendiri. Upaya yang dilakukan oleh daerah yaitu dengan mengoptimalkan potensi sektor pariwisatanya. Pemda mempunyai kewenangan untuk melakukan pungutan berdasarkan peraturan yang berlaku. Pendapatan diperoleh oleh Pemerintah Daerah dapat mencerminkan kemandirian daerah tersebut dalam mengurus keuangan daerahnya. Dalam mewujudkannya, Pemerintah Daerah melakukan intensifikasi yaitu melakukan kebijakan pada penerimaan obyek PAD secara

optimal dan secara ekstififikasi yaitu dengan mempeluas jaringan obyek Pendapatan Asli Daerah.

Pengembangan ini dilakukan oleh setiap daerah dengan memanfaatkan potensi yang dimilikinya. Jika pada negara keberadaan pariwisata dapat menambahkan jumlah pendapatan devisa maka bagi suatu daerah adanya suatu industri pariwisata ini dapat menambahkan pendapatan bagi daerahnya sendiri. Keterkaitan antara sektor pariwisata dan pendapatan daerah dicapai melalui pendapatan asli daerah dan bagi hasil pajak/bukan pajak. Melalui pendapatan tersebut, sektor pariwisata dapat dijadikan sebagai sektor yang mempengaruhi perkembangan suatu daerah. (Ghaniy Sanaubar, Wahyu Hidayat, 2017)

Abu Rizal (2016) menyatakan bahwa Pariwisata merupakan industri jasa yang sangat padat, karena mencakup semua arus pengunjung dari tempat tinggalnya ke daerah tujuan. Destinasi wisata juga mencakup travel, *tour guide*, penyedia penginapan, restoran, tempat hiburan dan komponen lainnya. Keanekaragaman produk dan fasilitas yang memadai merupakan aset dan penunjang pengembangan pariwisata di Surabaya. Surabaya juga menyediakan berbagai jenis produk dan pariwisata, mulai dari tempat rekreasi alam, tempat religi, gedung tua, dan taman-taman kota.

Surabaya mengembangkan potensi yang dimilikinya yaitu pada sektor pariwisatanya. Kota Surabaya dalam mewujudkan otonomi daerahnya juga melakukan pengembangan pada potensi-potensi yang dimiliki. Sebagai daerah yang menjadi Ibukota Provinsi Jawa Timur, Surabaya mempunyai

perkembangan ekonomi yang pesat dengan kegiatan ekonomi yang berpusat pada perdagangan dan jasa. Berdasarkan letak geografisnya yang berbatasan dengan Selat Madura sebelah utara membuat Kota Surabaya mempunyai wisata bahari berupa hutan mangrove dan pantai. Selain itu juga Surabaya mempunyai warisan peninggalan sejarah berupa wisata religi dan wisata kota tua. Sebagai daerah metropolitan yang tidak terlepas dari kemewahan kota, Surabaya juga mempunyai pusat perbelanjaan. Adanya pengembangan potensi pariwisata ini membuat jumlah wisawatan meningkat dan sektor-sektor pariwisata banyak bermunculan dan berkembang. (Gotama, Monica Kwanda, 2018).

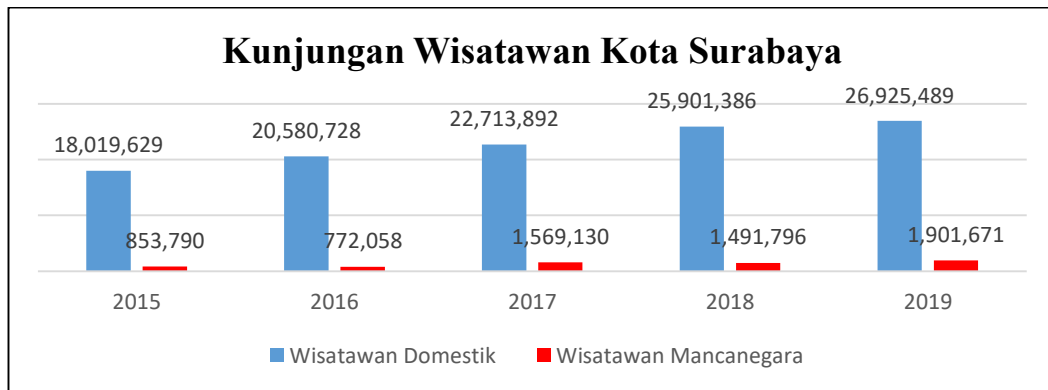
Keberadaan wisawatan menjadi sangat penting dalam sebuah industri pariwisata mengingat peran wisatawan dapat menambah pendapatan dari sektor pariwisata berupa retribusi. Pengunjung wisata yang berkunjung dalam suatu objek wisata akan dikenai biaya karcis masuk, pengunjung yang berkunjung menggunakan kendaraan pribadi juga akan dikenai oleh biaya parkir. Sehingga keberadaan wisatawan dapat menambah pendapatan sektor retribusi berupa retribusi tempat wisata dan retribusi parkir. (Sudiana, 2015)

Penerbitan tanda DUP oleh Dinas Pariwisata Kota Surabaya tiap tahun selalu meningkat diantaranya adalah Usaha Jasa dan Saran yang meliputi hotel, tempat penginapan, bar, kafe, restoran, pusat penjualan makanan, biro dan agen perjalanan wisata, dan konsultasi wisata. Penerbitan paling banyak adalah pada usaha restoran dimana pada 2017 sejumlah 155 usaha dan pada 2018 sejumlah 196 usaha. Dan selanjutnya adalah usaha biro perjalanan wisata dimana pada

2017 sejumlah 38 usaha dan pada 2018 meningkat sebesar 59 usaha. (BPS Surabaya, 2019).

Menurut Dewandaru & Purnamaningsih (2016) Usaha sarana akomodasi ini menjadi sangat penting mengingat tersedianya fasilitas hotel dan restoran berhubungan langsung dengan pengunjung atau wisatawan untuk bisa menjangkau tujuan wisatanya. Penyediaan usaha jasa seperti biro perjalanan juga berhubungan dengan kemudahan akses wisatawan menuju tempat wisatanya.

Adanya kunjungan wisatawan yang memanfaatkan hotel sebagai bagian dari kegiatannya akan memberikan pengaruh bagi penerimaan pajak yang didapatkan dari sektor tersebut. Selain hotel, wisatawan yang memanfaatkan restoran sebagai bagian dari wisatanya juga dapat menambah penerimaan dari sektor tersebut. Di tambah lagi dengan wisatawan yang mengunjungi tempat hiburan seperti diskotik, bar, klub malam, dan lain-lain juga dapat menambah penerimaan dari sektor tersebut. Dimana perolehan pajak dari ketiga sektor ini tiap tahunnya akan di setorkan sebagai pajak pendapatan yang diterima oleh suatu daerah. Dengan demikian maka keberadaan ketiga sektor usaha ini mempunyai pengaruh dalam meningkatkan pendapatan daerah. (Widyaningsih, 2014)



Gambar 1.1 Jumlah Kunjungan Wisatawan Kota Surabaya 2015-2019

Sumber : BPS Kota Surabaya, data diolah

Berdasarkan gambar 1.1 bahwa kunjungan wisatawan di Kota Surabaya tiap tahun terus mengalami peningkatan baik wisatawan domestik maupun mancanegara. Pada 2015 tercatat sebanyak 18.019.629 wisatawan domestik dan 853.790 wisatawan mancanegara berkunjung ke Kota Surabaya. Pada 2016 tercatat sebanyak 20.580.728 wisatawan domestik dan 772.058 wisatawan mancanegara. Pada 2017 tercatat sebanyak 22.713.892 wisatawan domestik dan 1.569.130 wisatawan mancanegara. Pada 2018 tercatat 25.901.386 wisatawan domestik dan 1.491.796 wisatawan mancanegara. Pada 2019 tercatat 26.925.489 wisatawan domestik dan 1.901.671 wisatawan mancanegara. (BPS Kota Surabaya, 2020)

Meningkatnya kunjungan wisatawan, potensi pariwisata yang menarik, dan banyaknya usaha pendukung pariwisata yang ada dan berkembang di Surabaya membuat hal ini menarik untuk diteliti dengan melihat pada pendapatan yang diperoleh dari pariwisata yang terdiri dari pajak dan retribusi dapat berkontribusi dalam PAD yang diterima oleh Kota Surabaya tiap tahunnya. Penelitian dengan tema yang sama pernah dilakukan oleh (Muchlisin, Purnamaningsih and Juwarni, 2019) menyimpulkan bahwa kontribusi sektor pariwisata masih kecil melalui pajak

hotel dan restoran berada diposisi nomor empat dan retribusi pariwisata berada di nomor lima dalam penerimaan PAD. Selanjutnya, penelitian yang sama pernah dilakukan oleh (Mardianis and Syartika, 2018) menyimpulkan bahwa kontribusi pendapatan sektor pariwisata masih kurang terhadap Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan paparan di atas maka peneliti ingin untuk menganalisis lebih lanjut mengenai **“KONTRIBUSI SEKTOR PARIWISATA TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA SURABAYA”**.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka dapat ditarik suatu rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu :

1. Bagaimana kontribusi pajak sektor pariwisata (pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan) terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya?
2. Bagaimana kontribusi retribusi sektor pariwisata (retribusi parkir, retribusi pemakaian kekayaan daerah, retribusi tempat rekreasi dan olahraga, retribusi izin mendirikan bangunan, dan retribusi terminal) terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya?

1.3 Tujuan Penelitian

Maksud dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya. Adapun tujuan dari kegiatan ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis kontribusi pajak sektor pariwisata terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kontribusi retribusi sektor pariwisata terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya

1.4 Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini mempunyai batasan masalah untuk menjadi fokus penelitian, yaitu :

1. Penelitian mencakup data kurun waktu selama periode tahun 2011 sampai dengan 2019 pada Kota Surabaya
2. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendapatan Asli Daerah, Pajak Sektor Pariwisata, dan Retribusi Sektor Pariwisata
3. Penelitian ini berfokus pada pendapatan sektor pariwisata

1.5 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Bagi masyarakat umum, sebagai alat untuk menambah dan memperkaya ilmu pengetahuan serta bahan studi komparatif penelitian lain yang berkaitan dengan analisis pengaruh sektor pariwisata terhadap pendapatan asli daerah Kota Surabaya.
2. Bagi Universitas, dapat menambah acuan akademis dan koleksi perpustakaan Fakultas Ekonomi UPN “Veteran” Jawa Timur & perpustakaan pusat UPN “Veteran” Jawa Timur dalam membahas ataupun memecahkan masalah yang sama.
3. Bagi peneliti, dapat menambah pengalaman dan pengetahuan tentang cara penulisan karya ilmiah yang baik dan sekaligus melatih diri untuk memecahkan masalah.